

Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun

Noraiyan

Program Studi Diploma IV Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi

Abstract

This research aims to analyze the level of development of the Regional Revenue and Expenditure Budget and to analyze the performance of the management of the revenue budget in the local government of the Sarolangun Regency in terms of the routine expenditure ratio and to analyze the ability of the budget and financing of the Sarolangun Regency Government. The research method used is a descriptive analysis method of collecting quantitative data. The results of this study indicate that the level of development of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Sarolangun Regency during the period 2003-2012 experienced an average development of 18.16% with the Routine Expenditure Ratio of Sarolangun Regency during the period 2003-2012 occurring effectively and efficiently every year where the average -The average regional routine expenditure ratio is 0.73 per year. Meanwhile, seen from the ratio of Regional Development Expenditure in Sarolangun Regency during the period 2003 - 2012 the average was 0.52 per year. This shows that the Regional Financial Performance of the Sarolangun Regency Government occurred effectively and efficiently in accordance with the target and the Ratio of Budget Effectiveness of Regional Income and Expenditures of Sarolangun Regency during the 2003 – 2012 Period was very effective and efficient where the use of APBD Realization and APBD Targets was in accordance with the budget so that it was even. -the average APBD Effectiveness Ratio reaches a value of 0.90. This means that the point of balancing financial performance and the effectiveness of the Sarolangun Regency APBD is effective.

Keywords: Budget Management Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan pada pemerintah daerah kabupaten Sarolangun ditinjau dari rasio belanja rutin dan Menganalisis kemampuan anggaran belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dari pengumpulan data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2003–2012 rata-rata mengalami perkembangan sebesar 18,16% dengan Rasio Belanja Rutin Kabupaten Sarolangun selama periode 2003 – 2012 terjadi secara efektif dan efisien tiap tahunnya dimana rata-rata Rasio Belanja Rutin Daerah sebesar 0,73 tiap tahunnya. Sedangkan dilihat dari Rasio Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2003 – 2012 rata-rata sebesar 0,52 tiap tahunnya. Ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terjadi dengan Efektif dan Efisien sesuai dengan yang ditargetkan dan Rasio Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun selama Periode 2003 – 2012 sangat efektif dan efisien dimana penggunaan Realisasi APBD dan Target APBD sesuai dengan yang anggarakan sehingga Rata-rata Rasio Efektifitas APBD mencapai nilai 0,90. Ini berarti titik keseimbangan kinerja keuangan dan efektifitas

APBD Kabupaten Sarolangun efektif.

Kata Kunci : Kinerja Pengelolaan APBD

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah Menurut No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

Pada tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun sebesar Rp.336,56 milyar, tahun 2010 telah meningkat sebesar Rp.526,69 milyar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2006 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun hanya sebesar Rp.10,018 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.18,481 milyar pada tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” artinya sedia dan “nomy” artinya aturan atau undang-undang, jadi autonomy artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”..

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu:

1. Perpendidikan politik
2. Pelatihan kepemimpinan
3. Menciptakan stabilitas politik

4. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Menurut Haryanto (2007), prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar dan menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkuat negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

Asas-asas Otonomi Daerah

Asas – asas otonomi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang di gunakan oleh pemerintah daerah terdiri dari tiga asas, yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Asas Tugas Pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Asas penyelenggaraan otonomi daerah yang terpenting adalah desentralisasi (Latin: *decentrum*). Desentralisasi dapat diartikan “lepas dari pusat” atau “tidak terpusat”. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah, di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat yang ada di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah. Pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi adalah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik dari segi *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.

c. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ketentuan Umum nomor 9, UU 32 Tahun 2004). Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Pelaksanaan asas tugas pembantuan ini dapat dilaksanakan di provinsi, kota, dan desa. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan asas tugas pembantuan ini, pusat dapat menerapkan di provinsi sampai ke desa. Demikian juga provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah kabupaten/kota sampai ke desa-desa. Pelaksanaan tugas pembantuan ini senantiasa untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Pemerintah daerah selaku pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. (Raharjo:2011)

Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang- Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan

Lain-lain pendapatan Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kelompok pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

- a. Dana Bagi hasil Pajak
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri, dan lain-lain.

Kinerja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Daerah

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga.

Pengukuran Kinerja

Dalam membangun dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja di bidang keuangan daerah, dapat menggunakan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan sesuai dengan berbagai aspek dan unsur dalam bidang keuangan daerah, yang menyangkut pencapaian kinerja komponen- komponen Pendapatan Asli Daerah/PAD (khususnya pada daerah dan retribusi daerah), pendapatan daerah (Bagian Keuangan, Dispenda, dan lainnya). Dengan demikian pencapaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan pengukuran secara rinci dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). (<http://www.feuhamka.com/artikel22.htm>)

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Pengelolaan APBD Pemerintah Daerah

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Widodo dalam Detisa (2009) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Tolak Ukur Kinerja Keuangan

Menurut Warsono (2002:28-29) Untuk menentukan apakah suatu perusahaan sehat atau tidak dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu :

1. Metode Lintas Waktu (Time Series)

Metode ini merupakan metode tolok ukur analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan perusahaan dari satu periode tertentu dengan periode sebelumnya.

2. Metode Lintas Seksi/Industri (Cross Section)

Metode ini merupakan metode tolok ukur yang digunakan menentukan sehat tidaknya posisi keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan rasio keuangan rata-rata industrinya yang bersangkutan.

Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Ihyaul Ulum (2009), antara lain:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemudian dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}}$$

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Debt Service Coverage Raatio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain mengandalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut misalnya menyangkut persyaratan, penggunaan pinjaman, maupun prosedur.

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHBT), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Biaya Wajib (BW) dalam hal ini berasal dari jumlah belanja rutin dan dana alokasi khusus (DAK).

(PAD + BD + DAU) – BWRasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}_{X_n - X_{n-1}}}{\text{realisasi penerimaan PAD}_{X_{n-1}}}$$

Keterangan:

X_n = tahun sekarang

X_{n-1} = tahun sebelumnya

Mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 58 Tahun 2005 maka perhitungan rasio pertumbuhan dapat disesuaikan dengan mengganti belanja rutin dan belanja pembangunan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah

berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumber-sumber lain. Data sekunder ini terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sarolangun tahun 208 - 2012.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2008 - 2012.
3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun 2008 - 2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sarolangun.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa, yaitu dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada organisasi / lembaga tersebut. Masalah yang diteliti mengenai data Kabupaten Sarolangun, dalam angka data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Data tersebut diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sarolangun dan Kantor Bupati Sarolangun.

Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka- angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Untuk melihat perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun dapat di ukur dengan rumus :

$$PAPBD = \frac{APBD t - APBD_{t-1}}{APBD_{t-1}} \times 100\%$$

2. Untuk melihat kinerja pengeloaan anggaran pendapatan pemerintah daerah ditinjau dari rasio belanja rutin dapat menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

3. Untuk mengukur kemampuan anggaran pendapatan dan belanj daerah apat menggunakan rumus Rasio Efektifitas dengan cara :

$$RE = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Target APBD}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tingkat Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2003 – 2012**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan fungsi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. APBD juga merupakan salah satu kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah yang di rendanakan dalam anggran. Dalam undang-undang No.5 tahun 1974, Anggran Pendapatan dan Belanja Dearah adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan jumlah pajak yang di bebaskan kepada rakyat dari suatu daerah dan untuk menentukan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun dalam perkembangannya sangat berfluktuasi selama periode tahun 204

– 2013, untuk melihat perkembangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun dapat dilihat melalui tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1. Perkembangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2003 – 2012.

Taahun	Realisasi APBD (Rp)	Perkembangan (%)
2003	201.230.397.000,00	-
2004	226.751.797.000,00	12,68
2005	279.005.730.000,00	23,04
2006	336.387.807.592,00	20,57
2007	398.842.823.002,00	18,57
2008	465.112.655.535,00	16,62
2009	473.524.535.235,00	1,81
2010	526.690.838.732,00	11,23
2011	676.808.287.593,77	28,50
2012	856.046.120.158,00	26,48
Rata –Rata	416.083.397.259,00	18,16

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun 2013

Dari tabel 5.1. dapat dilihat bahwa perkembangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode 2003 – 2012 terakhir ini mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Dimana perkembangan rata-rata pertahunnya sebesar 18,16%. Dimana pada tahun 2004 perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun sebesar 12,68% dan meningkat menjadi 20,04% ditahun 2005.

Perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2006 sebesar 20,57% dan terus menurun sampai dengan tahun 2009 sebesar 1,18%. Turunya nilai perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun ini disebabkan kurangnya pengoptimalan anggran pada tahun tersebut, serta realisasi dan target APBD yang diterima Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak begitu besar selisihnya dengan tahun sebelum sebelumnya.

Ditahun 2010 hingga tahun 2012 perkembangan APBD Kabupaten Sarolangu sangat dirasakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dimana pada tahun 2010 mengalami perkembangan sebesar 11,23% dan meningkat sebesar 28,50% dan perkembangan ini merupakan perkembangan terbesar yang di terjadi selama periode sepuluh tahun analisis, peningkatan perkebangan ini disebabkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah yang meningkat dan memiliki realisasi yang jauh di atas target APBD. Kemudian mengalami

penurunan perkembangan APBD pada tahun 2012 sebesar 26,48%.

Bagaimana Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun ditinjau dari Rasio Belanja Rutin.

Merasionalkan belanja daerah sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Dalam hal ini Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2003 – 2012 memiliki Rasio Belanja rutin dan Rasio Belanja Pembangunan Daerah yang berfluktuasi tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3 berikut :

Tabel 5.2. Rasio Belanja Rutin Daerah Kabupaten Sarolangun Periode 2003 – 2012

Tahun	Belanja Rutin	REALISASI APBD	Rasio
2003	123.320.000.000	201.230.397.000	0,61
2004	200.456.324.000	226.751.797.000	0,88
2005	238.986.800.000	279.005.730.000	0,85
2006	255.900.000.000	336.387.807.592	0,76
2007	320.111.832.002	398.842.823.002	0,80
2008	417.994.238.936	465.112.655.535	0,90
2009	370.127.437.811	473.524.535.235	0,78
2010	256.215.199.714	526.690.838.732	0,48
2011	387.577.166.032	676.808.287.593,77	0,57
2012	551.771.793.978	856.046.120.158,00	0,64
Rata – Rata			0,73

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun 2013

Dari tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata rasio Belanja Rutin Kabupaten Sarolangun selama periode 2003 – 2012 rata-rata sebesar 0,73 per tahunnya. Perkembangan Rasio Belanja Rutin Kabupaten Sarolangun ini terjadi secara fluktuasi dimana pada tahun 2003 rasio belanja rutin sebesar 0,61 dan meningkat sampai dengan tahun 2005 sebesar 0,85 . selanjutnya rasio belanja rutin daerah Kabupaten Sarolangun tidak mengalami peningkatan melainkan penurunan rasio selama tahun 2007 – 2012 dengan rasio pada tahun 2007 sebesar 0,80 terus menurun sampai tahun 2008 sebesar 0,90 dan seterusnya sampai dengan akhir tahun 2012 rasio belanja rutin sebesar 0,64.

Rasio belanja rutin Kabupaten Sarolangun terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 0,90 . Besarnya rasio belanja rutin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dari sektor belanja modal yang memiliki kontribusi besar terhadap belanja rutin daerah Kabupaten Sarolangun. Sedangkan Rasio Belanja Rutin Kabupaten Sarolangun terkecil ini terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,48. Kecil nyarasio Belanja Rutin ini dikarenakan sektor belanja pegawai yang relatif lebih kecil.

Sedangkan jika dilihat dari rasio belanja pembangunan Kabupaten Sarolangun juga terjadi secara fluktuasi dimana nilai rasio belanja pembangunan selama periode 2003 – 2012 terus mengalami perkembangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3. Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2003 – 2012

Tahun	Belanja Pembangunan	REALISASI APBD	Rasio
2003	0,570336437	0,570336437	0,570336437
2004	0,674556947	0,674556947	0,674556947
2005	0,612697388	0,612697388	0,612697388
2006	0,590895978	0,590895978	0,590895978
2007	0,64423396	0,64423396	0,64423396
2008	0,373333388	0,373333388	0,373333388
2009	0,459125305	0,459125305	0,459125305
2010	0,484979941	0,484979941	0,484979941
2011	0,476280586	0,476280586	0,476280586
2012	0,378347374	0,378347374	0,378347374
Rata – Rata			0,52647873

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun 2013

Dari tabel 4.3. tersebut ternyata rasio belanja pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun selama periode 2003 – 2012 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rasio rata-rata sebesar 0,52 tiap tahunnya. Pada tahun 2003 rasio belanja pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar 0,57 dan terus mengalami peningkatan sebesar 0,67 dan 0,61 di tahun 2004 – 2005. Kemudian pada tahun 2006 hingga 2007 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari Rasio sebesar 0,59 sampai dengan 0,64 di tahun 2008. Namun rasio pembangunan ini mulai menurun dari tahun 2008 – 2012 sebesar 0,37 di akhir tahun 2012.

Rasio Belanja Pembangunan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,64 dan rasio belanja pembangunan terkecil terjadi pada tahun 2008 sebesar 0,37. Besarnya nilai Rasio Belanja Pembangunan ini disebabkan efektifnya nilai realisasi dan target dari pada Variabel Belanja Tidak Langsung tersebut. Sedangkan kecilnya nilai Rasio Belanja Pembangunan Daerah disebabkan oleh kecilnya nilai realisasi anggaran terhadap target Belanja Pembangunan Daerah di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2008.

Rasio Efektifitas Kemampuan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2008 – 2012

Dalam perkembangan Kemampuan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun maka untuk melihat apakah APBD Kabupaten Sarolangun terlaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilihat tingkat efektifitas APBD Kabupaten Sarolangun. Untuk melihat efektifitas APBD Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4. Rasio Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2008 - 2012

Tahun	Target APBD	Realisasi APBD	Rasio Efektifitas
2003	133.505.398.078	201.230.397.000	1,51
2004	220.857.668.000	228.631.629.949	1,03
2005	254.415.016.450	279.005.730.415	1,09

2006	354.463.459.268	403.219.487.642	1,13
2007	459.974.181.977	544.206.032.430	1,18
2008	107.151.079.845	143.505.398.079	1,33
2009	156.144.491.495	91.056.741.282	0,58
2010	27.519.572.894	32.552.298.000	1,18
2011	7.941.190.909,17	33.119.526.321,40	4,17
2012	19.608.475.175.175	19.608.475.175.175	1,00
Rata – Rata			0,90

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun 2013

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa Rasio Efektifitas APBD Kabupaten Sarolangun selama periode 2003 – 2012 mengalami peningkatan tiap tahunnya dan berfluktuasi. Dapat dilihat dimana pada tahun 2003 Rasio Efektifitas APBD hanya sebesar 1,51 dan terus menurun sampai dengan tahun 2010 sebesar 1,18 . sedangkan tahun 2004 Rasio Efektifitas hampir menemukan titik keseimbangan / efisien anggaran dimana rasio efektifitas sebesar 1,03 dan tahun 2005 sebesar 1,09. Pada tahun 2011 Rasio Efektifitas APBD Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan tertinggi sebesar 4,17 dan semakin menurun sebesar 1,00 pada tahun 2012 .

Dari nilai Rasio Efektifitas APBD Kabupaten Sarolangun periode tahun 2003 – 2012 ternyata hanya tahun 2012 yang mengalami keseimbangan tingkat efektifitas antara target dan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Sarolangun. Keseimbangan Sebesar 1,00 ini menunjukkan berarti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun sangat Efektif, dimana penggunaan anggaran sesuai dengan target anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2003 – 2012 rata-rata mengalami perkembangan sebesar 18,16%. Dimana perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 28,50% dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 1,81%.
2. Rasio Belanja Rutin Kabupaten Sarolangun selama periode 2003 – 2012 terjadi secara efektif dan efisien tiap tahunnya dimana rata-rata Rasio Belanja Rutin Daerah sebesar 0,73 tiap tahunnya. Sedangkan dilihat dari Rasio Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2003 – 2012 rata-rata sebesar 0,52 tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terjadi dengan Efektif dan Efisien sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Rasio Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun selama Periode 2003 – 2012 sangat efektif dan efisien dimana penggunaan Realisasi APBD dan Target APBD sesuai dengan yang anggarakan sehingga Rata-rata Rasio Efektifitas APBD mencapai nilai 0,90. Ini berarti titik keseimbangan kinerja keuangan dan efektifitas APBD Kabupaten Sarolangun efektif.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menerapkan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan kedepannya mampu meningkatkan perkembangan APBD dengan mengoptimalkan pengelolaan Realisasi APBD agar dapat meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun diharapkan lebih memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar kedepanya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasionalitasnya lebih meningkat dan berkembang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
Anonim, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2010. *Realisasi APBD Kab. Sarolangun 2007–2013*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun. Sarolangun Dalam Angka 2010. Boediono. 1992, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Dahmiri, D. (2015). Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai Kantor Camat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
- Detisa, Dora (2009) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Khusus Pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam" skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, "Bunga Rampai", UPP AMP YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin (2007). *Akuntansi Sektor Publik*, edisi pertama. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryati, Sri (2006). *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman tahun 1998 - 2000*. Skripsi.
- Hutomo, Tri Wiratmono. 2006. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Sebagai Kinerja Keuangan*. Skripsi. UNS.
- Kadarwati, S.N. (2007). *Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi.
- Ladjin, Nurjana (2008). *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Study kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Manan, Bagir. 1994. *Dasar-dasar Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Desentralisasi*. Dalam Skripsi. Universitas Jambi.
- Mardiasmo, April 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta.
- Suratno P.N, 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suyono, (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Suprpto, Tri (2006) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004" skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Warsono, 2002. *Ciri – Ciri Keuangan*. Dalam Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Whitaker, 1995. *Defenisi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Dalam Skripsi. Universitas Jambi.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.